

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia
TEMA : Tempo, Asian Agri, dan Jurnalisme Investigasi
SURAT KABAR/MAJALAH : Majalah Tempo

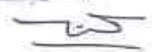
Hari Kamis Tanggal 6 Bulan Januari Tahun 2008 Halaman 40-41 Kolom 1-4

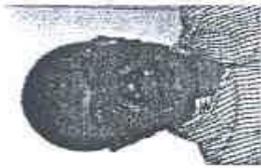
RINGKASAN:

Diskusi publik dengan tajuk "Menguak Misteri di Balik Berita Kasus Pajak Asian Agri", benar-benar menjadi sebuah misteri bagi para peneliti, terutama dalam hal independensi. Dengan metodologi analisis isi, analisis wacana kritis, dan analisis kerangka dengan biaya yang relatif murah. Dengan berdasarkan teks, menuai banyak protes karena hilangnya sebuah konteks yang menjadi dasar lahirnya teks tersebut, yang memang untuk kepentingan publik. Para pihak yang mengatasnamakan diri mereka wakil dari sebuah lembaga besar akademik antara lain, Hermin Indah Wahyuni, Ketua jurusan Komunikasi UGM mewakili UGM, dan Wahyu Wibowo alumnus Fakultas Sastra UI yang secara proaktif menawarkan jasa lembaganya yaitu P3-ISIP UI untuk meneliti kasus tersebut. Dengan membawa nama lembaga yang menaungi mereka, maka mereka merupakan aset penting bagi lembaga terkait dalam menjaga kredibilitas serta nilai yang menjadi hasil penelitian mereka. Sedangkan apa yang ditulis *Koran Tempo* dan *Majalah Tempo* tentang pemberitaan kasus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri merupakan sebuah kemerdekaan yang dimiliki pers melalui jurnalisme investigasi. Bagi pihak yang merasa dirugikan akan mencoba menekan, mengancam maupun memanipulasi pandangan publik, untuk itu hasil penelitian para ilmuwan beberapa lembaga besar tersebut mempengaruhi independensi pers dengan membesar-besarkan berita positif atau menutup-nutupi berita negatif.

CATATAN :

--





Arya Gunawan*

Tempo, Asian Agri, dan Jurnalisme Investigasi

7/2/21

WILLIAM Mark Felt, Sherron Watkins, dan Inu Kencana memiliki persamaan: mereka adalah *whistle-blower* alias pembocor praktek tak terpuji dari lembaga yang mereka kenal baik. Mark Felt adalah bekas Wakil Direktur Biro Penyelidik Federal (FBI) Amerika Serikat. Pada 1972-1974, dia membocorkan kepada wartawan The Washington Post, Bob Woodward, skandal Watergate yang membuat Richard Nixon mundur sebagai presiden. Mark Felt lebih dikenal sebagai "Deep Throat" karena Woodward menutup rapat jati diri sumber rahasianya itu, sampai Mark Felt sendiri mengaku pada 2005.

Sherron Watkins bekas petinggi Enron, perusahaan energi di AS. Pada 2001, dia membocorkan penyelewengan keuangan di sana, hingga Enron bangkrut dan sejumlah petingannya harus berurusan dengan hukum. Adapun Inu Kencana identik dengan sumber informasi tentang sejumlah kebobrokan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, tempat dia mengajar.

Vincentius Amin Sutanto bisa masuk kelompok ini. Sebagai orang yang mengurus keuangan Asian Agri—perusahaan yang terkait dengan Sukanto Tanoto, yang pada 2006 dinobatkan majalah Forbes sebagai orang terkaya Indonesia—Vincent membocorkan dugaan penggelapan pajak perusahaan itu kepada *Tempo*.

Keempat nama di atas adalah pembocor dari kalangan dalam. Mereka "aset" amat berharga dalam investigasi yang dilakukan lembaga-lembaga resmi negara, maupun investigasi "tidak resmi" yang dijalankan media massa melalui praktek jurnalisme investigatif. Semua buku rujukan investigasi menganjurkan wartawan mencari para pembocor dari kalangan dalam ini sebagai sumber informasi penting.

Para pembocor ini boleh jadi memiliki motif tertentu: ingin membalas ketidakadilan yang mereka alami, ingin memojokkan seteru mereka, ataupun ingin memberantas praktek busuk yang tak sesuai dengan hati nurani mereka. Urusan motif bisa dikesampingkan jika kepentingan publik yang lebih besar tengah dipertaruhkan. Mereka yang paham dunia jurnalistik hingga ke tingkat praktek—bukan sekadar berkutat dengan teori—tentu tidak asing dengan pedoman di atas.

Tjipta Lesmana, Hermin Indah Wahyuni, dan Wahyu Wibowo memiliki persamaan: menjadi pembicara pada diskusi publik di Jakarta, 18 Desember 2007, disponsori Asian Agri. Mereka secara terpisah dilibatkan Asian Agri meneliti berita-berita dugaan skandal pajak perusahaan tersebut yang dimuat majalah dan koran *Tempo*.

Tjipta, ahli komunikasi dari Universitas Pelita Harapan, diminta sebagai pribadi. Hermin selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada mengaku mewakili lembaga. Wahyu, alumnus Fakultas Sastra Universitas Indonesia, mengaku proaktif mendekati Asian Agri untuk menawarkan jasa lembaganya, Pusat Penelitian dan Pengkajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,

dalam meneliti topik yang sama. Logo UGM dan UI terpampang di spanduk acara. Belakangan UGM menyatakan akan menelusuri riwayat munculnya penelitian tersebut, sementara UI menegaskan bahwa lembaga Wahyu tak ada kaitannya dengan UI.

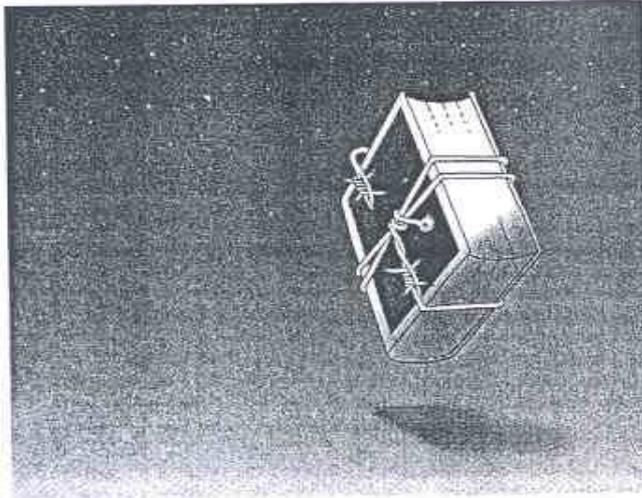
Kesimpulan penelitian mereka mirip: berita-berita kasus Asian Agri di *Tempo* mengandung bias. Metodologi yang digunakan adalah analisis isi, analisis wacana kritis, dan analisis kerangka, yang cukup populer karena tak sulit dilakukan, berbiaya relatif rendah, serta tidak mengganggu pihak yang tengah diteliti (karena penelitian hanya berdasarkan teks). Namun banyak kritik terhadap metodologi tersebut, terutama karena kemungkinan hilangnya konteks yang menjadi dasar lahirnya sebuah teks.

Hilangnya konteks ini amat kelihatan dari hasil penelitian ketiga peneliti tadi. Misalnya saja, mereka mempertanyakan mengapa *Tempo* gencar memberitakan kasus Asian Agri. Padahal jawabannya jelas: karena ada kepentingan publik yang besar di sana. Pers yang independen, bernurani, dan berani pasti tidak akan mendiamkan kasus semacam ini. Para peneliti juga bertanya mengapa Vincentius lebih diberi porsi dalam pemberitaan *Tempo*. Jawabannya sebetulnya juga jelas: karena Vincent memiliki banyak informasi berharga didukung dokumen lengkap, sementara menurut pengakuan *Tempo*, pihak Asian Agri terkesan enggan mengklarifikasi data yang dimiliki *Tempo* tersebut. Dalam hal ini, Vincent adalah aset amat berharga, sesuai dengan panduan investigasi sebagaimana telah dijelaskan.

Diskusi publik tersebut bertajuk "Menguak Misteri di Balik Berita Kasus Pajak Asian Agri". Istilah "misteri" sebetulnya merujuk pada serangkaian pertanyaan yang "mengusik" para peneliti sebagaimana disebutkan sebelumnya. Hasil penelitian mereka sendiri mengundang pertanyaan, terutama dalam hal independensinya, karena penelitian tersebut "dipesan" Asian Agri, yang notabene adalah pihak yang tengah diperiksa aparat pajak dan beperkara dengan *Tempo*.

Hermin dari UGM menyebut—mungkin bergurau—dibayar 10 persen dari Rp 1,3 triliun—angka yang diduga digelapkan Asian Agri, berdasarkan perhitungan aparat pajak. Tjipta mengaku tak tahu akan dibayar atau tidak. Wahyu tidak menyebut angka, tapi terang-terangan menyebut dirinya suka amplop dan isinya, berlawanan dengan wartawan idealis, yang tak mau menerima amplop dan isinya. Salah satu nilai ideal jurnalistik adalah larangan menerima amplop karena dapat mempengaruhi independensi: cenderung membesar-besarkan berita positif atau menutup-nutupi berita negatif dari si pemberi amplop.

Ihwal independensi ini, ada baiknya merujuk Julian Benda, sosiolog dan sejarawan dari Prancis, yang pada 1927 menerbitkan buku *La Trahison des Clercs (Pengkhianatan Kaum Intelektual)*. Tesis utama Benda adalah bahwa intelektual, yang seharusnya melakukan analisis rasional, logis, dan bertanggung jawab, berpeluang "tergoda" sehingga



mengatakan "sesuatu" sebagai kebenaran padahal tak jelas apakah "sesuatu" itu benar-benar kebenaran, atau mengatakan "sesuatu" sebagai kebenaran padahal tahu persis bahwa "sesuatu" tersebut bukan kebenaran.

Data dan fakta yang menjadi landasan ilmu bisa diteguk dan dipilah sesuai dengan keinginan seorang intelektual. Saya ingin merujuk ke artikel Tjipta Lesmana di *Kompas*, 23 Oktober 2003 (bisa dilihat di <http://kompas.com/kompas-cetak/0310/23/opini/639583.htm>). Dalam artikel itu, dia menegaskan, pers bisa digugat untuk kasus pencemaran nama baik. Dia mencomot sejumlah contoh, antara lain dari AS. Saya menanggapi bahwa menggugat pers berdasarkan pengalaman di AS tidaklah semudah seperti dipaparkan Tjipta. Artikel Tjipta hanya menyajikan "separuh kebenaran". Fakta yang tak ditampilkannya saya hadirkan dalam artikel tanggapan saya (bisa dilihat di <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/30/opini/649866.htm>).

Dalam artikelnya itu, Tjipta menyebutkan: Dalam putusannya terhadap delik pers *New York Times* versus Sullivan pada 1964, Mahkamah Agung AS dengan tegas mengatakan: "Public officials no longer could sue successfully for libel unless reporters or editors were guilty of actual malice when publishing false statements about them." Ini berarti wartawan bisa dituntut secara hukum jika tulisannya ternyata tidak benar dan wartawan bersangkutan tidak mempunyai upaya untuk mengecek kebenaran informasi yang diperolehnya.

Memang benar wartawan bisa dituntut terkait dengan tulisannya. Namun kesimpulan Tjipta sangat berbeda nuansanya jika merujuk kepada teks Inggris yang dikutipnya,

karena teks tersebut justru menyatakan hal yang sebaliknya: para pejabat publik tidak lagi bisa menuntut secara sukses dengan alasan pencemaran nama baik, kecuali jika si penuntut bisa membuktikan adanya *actual malice*.

Dia juga mengutip kasus Jenderal Westmoreland, mantan panglima pasukan AS di Vietnam, versus stasiun televisi CBS. Menurut Tjipta, CBS akhirnya mengalah dan bersedia membayar kompensasi tak kecil kepada Westmoreland, selain minta maaf secara terbuka. Fakta versi Tjipta ini tidak sesuai dengan kejadian sesungguhnya, yaitu bahwa kasus ini berakhir dengan penyelesaian di luar pengadilan, dan kedua pihak dianggap "sama-sama menyerah".

Dalam diskusi publik Asian Agri itu, Tjipta tampil dengan sejumlah komentar yang terkesan menyudutkan profesi jurnalistik. Ia membesar-besarkan dirinya sebagai pakar yang mumpuni. Puncaknya, dia mengumpat Metta Dharmasaputra, wartawan *Tempo* yang melacak kasus Asian Agri ini, dengan menyebut: "taik kucing itu Metta". Berdasar standar yang saya anut, sikap dan tutur kata Tjipta jauh dari apa yang lazim melekat pada seorang intelektual atau akademisi.

•••

Ringkasan penelitian UGM sepanjang dua setengah halaman tidak mudah dicerna. Ada kalimat ini: "Koefisien reliabilitas kesepakatan dua koder terhadap lima item berita yang berisi 88 paragraf melalui 28 kategori dan 134 unit kelas adalah 0,8731." Atau: "Ketidakpadanan dalam menerapkan *professional journalism standard* dengan sendirinya berakibat pada ketidaksesuaian terhadap utamanya pasal 1, 2, 3 dan 8 yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia". Atau istilah "media yang diteliti", "media yang terteliti". Semuanya mencerminkan kesulitan peneliti memaparkan pikiran mereka dengan jernih.

Akurasi juga layak dipertanyakan: dari penulisan tahun yang ceroboh (tertulis tahun "2027", semestinya "2007") hingga ke penarikan kesimpulan (contohnya, menyimpulkan berita-berita *Tempo* dalam kasus lumpur Lapindo tidak menuding Aburizal Bakrie sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Padahal sejumlah laporan *Tempo* menuntut tanggung jawab Aburizal Bakrie).

Era reformasi telah melahirkan kemerdekaan pers, dan salah satu bukti nyata pers yang merdeka adalah tumbuh dan berkembangnya jurnalisme investigasi. Tentu saja banyak pihak yang tak suka karena khawatir kepentingan mereka akan terusik. Berbagai upaya akan mereka lakukan untuk menghambat investigasi, agar pers jera dan jeri (dikenal sebagai "chilling effect"), entah lewat tekanan bisnis, ancaman, dan aksi kekerasan terhadap wartawan dan lembaga media, ataupun memanipulasi pandangan publik. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pers yang punya nurani dan nyali selain tetap merawat semangat untuk terus melakukan investigasi, semata-mata demi kepentingan orang banyak.

*) Pengamat media, mantan wartawan *Kompas* dan BBC di London